

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alasan pemilihan Dasawisma sebagai objek penelitian adalah karena Dasawisma memiliki peran strategis sebagai unit terkecil dari Gerakan PKK yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kedekatan Dasawisma dengan keluarga di tingkat RT/RW memungkinkan pelaksanaan program edukasi perlindungan perempuan dan anak berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus kekerasan terhadap kelompok rentan ini terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) menunjukkan bahwa setiap hari rata-rata terjadi 35 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 5 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Angka ini sebenarnya hanya puncak gunung es, mengingat masih banyak korban yang enggan melapor karena berbagai faktor kompleks.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan multidimensional. Di satu sisi, kita menghadapi persoalan modern seperti perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersial anak. Di sisi lain, masalah tradisional seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan anak masih terus terjadi. Yang lebih memprihatinkan, banyak kasus justru terjadi dalam lingkungan terdekat korban - di rumah, sekolah, atau lingkungan tempat tinggal yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya sudah cukup komprehensif dalam mengatur perlindungan perempuan dan anak. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan, pemerintah telah membentuk berbagai lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan. Namun demikian, efektivitas regulasi dan kelembagaan ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor.

Tantangan utama dalam implementasi perlindungan perempuan dan anak terletak pada beberapa aspek krusial. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perlindungan. Kedua, sistem rujukan yang belum optimal antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Ketiga, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten di tingkat daerah. Keempat, budaya patriarki yang masih kuat di berbagai daerah yang seringkali menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat.

Dalam konteks inilah peran organisasi masyarakat seperti Dasawisma menjadi sangat strategis. Dasawisma sebagai ujung tombak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki beberapa keunggulan komparatif. Pertama, jaringan yang sangat luas hingga ke tingkat RT/RW. Kedua, pemahaman mendalam tentang kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Ketiga, kedekatan emosional dengan warga yang memungkinkan pendekatan lebih personal. Keempat, fleksibilitas dalam merespon masalah-masalah spesifik di komunitasnya.

Kelurahan Cakung Barat di Jakarta Timur menjadi fokus penelitian yang menarik karena beberapa alasan. Sebagai wilayah padat penduduk dengan tingkat heterogenitas tinggi, kelurahan ini menghadapi tantangan perlindungan perempuan dan anak yang kompleks. Faktor urbanisasi, kemiskinan, dan keragaman latar belakang budaya menciptakan dinamika sosial yang unik. Program edukasi perlindungan perempuan dan anak oleh Dasawisma di kelurahan ini telah berjalan sejak 2020 dengan dukungan pemerintah setempat, namun menghadapi berbagai kendala implementasi.

implementasi program edukasi perlindungan perempuan dan anak oleh Dasawisma di kelurahan Cakung Barat sejumlah faktor yang menunjukkan urgensi perlindungan terhadap gender ini di Indonesia. Perlindungan perempuan dan anak di Jakarta sudah menjadi perhatian pemerintah, sebagaimana tercermin dalam kebijakan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP). Penelitian oleh Sitanggang dan Panjaitan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melindungi anak, masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam konteks implementasi kebijakan yang ada (Sitanggang & Panjaitan, 2023). Ini menunjukkan pentingnya program seperti yang dijalankan

oleh Dasawisma, yang dapat berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan dan kebutuhan komunitas.

Ketidakberdayaan kelompok perempuan dan anak di berbagai aspek kehidupan juga menjadi sorotan. Sutianti et al. menekankan bahwa pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dalam dekade terakhir, dengan program pengaduan yang dirancang untuk memberikan dukungan dan penanganan kasus kekerasan seksual (Sutianti et al., 2023). Selain itu, data menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi, dan program edukasi yang diimplementasikan oleh Dasawisma diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan bagi mereka (Amnesti & Indrawati, 2020).

Pemimpinan perempuan di tingkat lokal juga berkontribusi pada peningkatan perhatian terhadap isu-isu perlindungan perempuan dan anak. pemimpin perempuan mampu mendorong perbaikan dalam kebijakan yang memberikan perlindungan bagi kelompok rentan (Prastio et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Konflik sosial dan keadaan darurat juga berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penerapan program perlindungan sosial seperti yang dikemukakan oleh Suharta dan Septiarti dalam konteks kampung ramah anak di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa edukasi dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menangani isu ini (Suharta & Septiarti, 2018). Dalam hal ini, Dasawisma diharapkan dapat berfungsi serupa dengan mengedukasi masyarakat tentang perlindungan anak dan perempuan serta melibatkan mereka dalam menyelesaikan masalah yang ada di komunitas (Jamil et al., 2023).

Perlindungan perempuan dan anak merupakan isu yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan diskriminasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan

upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu perlindungan ini.

Masyarakat Jakarta Bogor Depok Tangerang (JABODETABEK) memiliki beragam latar belakang sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan terhadap peran perempuan dan anak. Dalam beberapa komunitas, norma-norma budaya yang patriarkis masih dominan dan dapat menghambat upaya perlindungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dalam program edukasi. Peran Dasawisma, sebagai organisasi berbasis masyarakat, memiliki posisi strategis dalam mengedukasi dan memberdayakan perempuan serta anak di lingkungan mereka. Melalui program edukasi perlindungan, Dasawisma dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan dan memberikan informasi yang diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Urgensi Program Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, program edukasi ini menjadi semakin mendesak. Edukasi yang efektif dapat membantu masyarakat untuk lebih peka terhadap isu-isu perlindungan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk membangun solidaritas dan dukungan di antara warga, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam melindungi sesama.

Dalam konteks Jabodetabek, terdapat berbagai lokus yang menunjukkan implementasi program edukasi perlindungan perempuan dan anak dengan pendekatan yang beragam dan kontekstual. Sebagai contoh, di DKI Jakarta terlihat adanya implementasi kebijakan perlindungan melalui struktur kelembagaan yang kompleks dengan penekanan pada koordinasi lintas sektor, yang mengindikasikan hal tersebut sebagai salah satu model lokus yang berperan penting dalam skema perlindungan nasional (Sitanggang & Panjaitan (2023)). Pendekatan ini menekankan integrasi antara unit-unit pemerintah dan organisasi non-pemerintah sehingga dapat memberikan respons cepat terhadap laporan serta indikasi kekerasan dan pelecehan yang terjadi.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan data awal dari Simfoni-PPA (2023), ditemukan beberapa masalah krusial dalam pelaksanaan program edukasi perlindungan perempuan dan anak oleh Dasawisma di Kelurahan Cakung Barat. Meskipun program ini telah berjalan sejak 2020 (Arsip Kelurahan Cakung Barat,

2023), kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang signifikan di wilayah tersebut berdasarkan laporan Puskesmas Kecamatan Cakung (2024). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan realita di lapangan, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian serupa oleh Suryani (2022) tentang efektivitas program perlindungan berbasis komunitas.

Salah satu penyebab utama adalah materi edukasi yang diberikan masih terlalu umum dan kurang kontekstual, seperti yang terungkap dalam FGD dengan kader Dasawisma pada Januari 2024. Temuan ini sejalan dengan kritik Dharmawan (2021) terhadap pendekatan "one-size-fits-all" dalam program pemberdayaan masyarakat. Materi yang bersifat normatif ini dinilai kurang menyentuh kebutuhan spesifik warga, terutama terkait kasus-kasus kekerasan siber yang meningkat 40% menurut data Polres Jakarta Timur (2023).

Metode penyampaian yang cenderung satu arah juga menjadi kendala serius, sebagaimana diakui oleh Ketua PKK Kelurahan dalam wawancara Februari 2024. Padahal, penelitian Pratiwi dkk. (2023) telah membuktikan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dalam program perubahan perilaku. Minimnya interaksi dialogis ini diperparah oleh jadwal kegiatan yang sering bentrok dengan waktu kerja warga, seperti dicatat dalam laporan evaluasi program triwulan IV 2023.

Lemahnya sinergi antar stakeholder merupakan masalah sistemik yang juga diidentifikasi oleh Komnas Perempuan (2022). Di Cakung Barat, hanya 30% kader yang memahami alur rujukan ke UPTD PPA berdasarkan tes pengetahuan yang dilakukan peneliti pada Maret 2024. Padahal, studi kasus dari Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus hingga 60%.

Yang paling mengkhawatirkan adalah absennya sistem monitoring yang kurang memadai, sebagaimana diungkapkan dalam audit internal Kelurahan (2023). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip manajemen program berbasis bukti yang ditekankan oleh KemenPPPA (2022). Tanpa data evaluasi yang valid, mustahil mengukur dampak riil program terhadap penurunan angka kekerasan di masyarakat.

Temuan-temuan ini memperkuat urgensi penelitian sebagaimana disarankan oleh pakar kebijakan sosial Hartanto (2023), bahwa program perlindungan perempuan dan anak membutuhkan evaluasi komprehensif setiap 3 tahun. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga kritikal untuk perbaikan kebijakan di tingkat kelurahan

Penelitian ini penting karena delapan alasan utama. Pertama, mendokumentasikan praktik dan tantangan program berbasis komunitas di wilayah urban. Kedua, mengidentifikasi tujuh faktor penghambat efektivitas program. Ketiga, merumuskan solusi masalah spesifik seperti rendahnya partisipasi warga dan kesenjangan pemahaman kader. Keempat, menjadi evaluasi pertama untuk program yang telah berjalan 4 tahun. Kelima, membangun model sinergi antar-stakeholder untuk memperbaiki sistem rujukan. Keenam, mengembangkan protokol adaptif bagi masalah unik di lokasi penelitian. Ketujuh, merespons keterbatasan anggaran dengan skema pendanaan alternatif. Kedelapan, menyusun instrumen monitoring partisipatif untuk mengukur perubahan perilaku.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, temuan penelitian akan memperkaya khazanah ilmu sosial, khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan. Secara praktis, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam merancang program perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, dimulai dari tingkat komunitas yang paling dasar. Dengan pendekatan bottom-up yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang benar-benar aman dan nyaman bagi perempuan dan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka pokok masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu :

- 1 Bagaimana Implementasi program edukasi perlindungan perempuan dan anak oleh Dasawisma kelurahan cakung barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas,maka tujuan penelitian ini yaitu

- 1 Untuk Mengetahui Implementasi program edukasi perlindungan perempuan dan anak oleh Dasawisma kelurahan cakung barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada bagian ini memuat manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian yang sesuai dengan program studi Administrasi Publik lebih luas dan akhirnya bermanfaat bagi masyarakat luas, adapun manfaat penelitian ini adalah

1.4.1 Manfaat Teoritis

A. Pengembangan Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik

- 1) Memberikan kontribusi pada literasi akademis terkait peran kelompok Dasawisma dalam program perlindungan perempuan dan anak, khususnya di tingkat komunitas urban.
- 2) Memperkaya kajian tentang community-based education dan model pemberdayaan berbasis partisipasi warga.

B. Teori Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- 1) Memperkuat konsep pencegahan kekerasan melalui pendekatan edukasi di tingkat akar rumput.
- 2) Menjadi referensi untuk studi tentang efektivitas program berbasis social network (seperti Dasawisma) dalam perubahan perilaku masyarakat.

C. Studi Kebijakan Sosial

- 1) Memberikan insight tentang integrasi program pemerintah (seperti PKK/Dasawisma) dengan isu perlindungan kelompok rentan.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Kelurahan Cakung Barat dan Dasawisma

- 1) Evaluasi implementasi program untuk perbaikan strategi edukasi, seperti metode penyampaian materi atau kolaborasi dengan pihak terkait (polisi, psikolog, LSM).
- 2) Memetakan hambatan (misal: partisipasi warga, ketersediaan sumber daya) dan solusi untuk program berkelanjutan.

B. Bagi Masyarakat

- 1) Meningkatkan kesadaran warga tentang hak perlindungan perempuan dan anak serta cara mengakses bantuan hukum/konseling.
- 2) Memperkuat jejaring komunitas untuk sistem dukung (support system) korban kekerasan.

C. Bagi Pemerintah dan Stakeholder

- 1) Rekomendasi kebijakan untuk replikasi program serupa di wilayah lain dengan adaptasi konteks lokal.
- 2) Dasar untuk penganggaran atau pelatihan kader Dasawisma terkait isu gender dan anak.

D. Bagi Akademisi/Peneliti Lanjutan

- 1) Data empiris untuk penelitian serupa dengan variasi lokasi atau pendekatan (misal: digitalisasi edukasi).

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini peneliti menuliskan rancangan penulisan dan pembahasan pada bab – bab berikutnya secara singkat. Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, inti masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian yang dijelaskan secara singkat untuk membantu pembaca memahami isi dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah tangga dalam lingkup RT yang menjadi basis kegiatan PKK, termasuk dalam program perlindungan perempuan dan anak. Edukasi dalam konteks ini diartikan sebagai proses penyadaran, pembelajaran, dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak serta cara pencegahan kekerasan. Lembaga-lembaga yang berperan dalam edukasi perlindungan perempuan dan anak meliputi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), UPTD PPA, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pada bab ini mendeskripsikan tentang teori dan konsep serta Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian, pengelolaan data dan analisis data. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dengan didukung oleh metode penelitian ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Dasawisma terkait perlindungan perempuan dan anak mencakup sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pelaporan kasus melalui sistem rujukan, serta pendampingan korban dalam mengakses layanan kesehatan, psikologis, dan hukum. Kasus nyata yang terjadi di Jakarta Timur, misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak, menjadi latar penting untuk memahami peran Dasawisma dalam memberikan edukasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan program dengan kondisi masyarakat. Sebagian warga masih kurang memahami mekanisme pelaporan, sementara kader Dasawisma menghadapi keterbatasan sumber daya. Dalam kerangka teori

Michael Lipsky, hal ini menggambarkan diskresi para street-level bureaucrats. Kader Dasawisma harus membuat keputusan cepat di lapangan, menyesuaikan metode edukasi, serta tetap menjaga akuntabilitas meski dengan keterbatasan sarana. Dengan demikian, teori Lipsky relevan untuk menjelaskan kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik implementasi di tingkat komunitas.

Pada bab ini memaparkan tentang deskripsi umum, sejarah singkat dan dilanjutkan dengan mendeskripsikan tentang hasil pengamatan di lapangan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

